BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah terbentuknya PT. POS INDONESIA terbagi kedalam beberapa periode yaitu :

a. Masa Kerajaan Mulawarman, Tarumanagara, Mataram, Purnawarman dan Majapahit.

Sejak jaman kerajaan Mulawarman, Sriwijaya, Tarumanagara, Mataram, Purnawarman dan Majapahit, komunikasi secara tertulis dalam bentuk surat-menyurat walaupun hanya terbatas di lingkungan para pendeta dan istana raja-raja yang telah berkembang.

Pada waktu itu surat ditulis diatas daun **"Tal"** atau daun pohon siwalan yang disebut **"Rontal",** yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama **"daun Lontar".**

Komunikasi pada saat itu tidak hanya terbatas pada hubungan dalam negeri, akan tetapi sudah meluas ke negara-negara, antara lain dengan Syangka (Sian/Thailand/Muangthai), Harutman (Birma, Myanmar) dan lain-lain, namun belum ada lembaga atau badan khusus yang menjadi perantara untuk pertukaran pengirim berita.

b. Masa Kekuasaan Belanda Hingga Pendudukan Jepang

Kedatangan bangsa Belanda di bumi Indonesia merupakan awal timbulnya hubungan surat-menyurat antara Indonesia dengan negeri Belanda, hal ini ditandai dengan kedatangan empat kapal Belanda pada tahun 1596 yang membawa surat untuk raja-raja Banten dan Jakarta (Batavia), dibawah pimpinan **Cornelis de Houtman.**

Pada tanggal 26 Agustus 1746 didirikan kantor pos baru pertama di Jakarta oleh Gubernur G.W Van Inhoff. Bersamaan dengan ditemukannya Telegram dan Telepon dibentuklah Dinas Pos. Telegram serta Telepon yang disingkat **PTT.**

Pada tahun 1922-1923 kantor pos Telegram dan Telepon (PTT) yang mula-mula berkedudukan di Welgtevreden (Gambir-Jakarta). Kemudian dipindahkan ke gedung Bow **"Bugerlijke Openbare Warken"** (Dinas Pekerjaan Umum Bandung).

Selama masa pendudukan Jepang, Jawatan PTT terpecah-pecah mengikuti Struktur Organisasi pemerintah Jepang, sehingga pada masa itu terdapat jawatan PTT Sumatera, jawatan PTT Jawa dan jawatan PTT Sulawesi.

c. Masa Perebutan Kekuasaan Pos Telegraf dan Telepon (PTT) dari Tentara Jepang Hingga Saat ini

Pada tanggal 14 Agustus 1945 pemerintah jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, akan tetapi penyerahan jawatan PTT dari tangan Jepang ke Indonesia ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pada tanggal 27 September 1945 sekelompok pemuda yang tergabung dalam

Angkatan Muda Pos Telegram dan Telepon (AMPTT), dengan gagah berani merebut kekuasaan atas jawatan dari tangan Jepang itulah saat berdirinya jawatan PT. Republik Indonesia dan selanjutnya setiap tahun kita peringati sebagai **HARI BAKTI POSTEL** sebagai kepala jawatan yang pertama diangkatlah Mas Soeharto yang didampingi oleh Dijar sebagai wakilnya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Dalam perkembangan selanjutnya, jawatan PTT menjadi perusahaan negara yang bersumber pada IBW (Indische Bedrijeven Wet) yang dinyatakan sebagai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 19 tahun 1960. oleh karena itu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 240 tahun 1961, status jawatan PTT diganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (Perusahaan Negara POSTEL). Mengingat lapangan kerja perusahaan negara pos dan Telekomunikasi mengalami perkembangan yang cukup pesat, maka pada tahun 1965 Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi di pecah menjadi dua bagain, yaitu :

- Perusahaan Negara Pos dan Giro (berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1965).
- Perusahaan Negara Telekomunikasi (berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1965).

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang menetapkan tentang status Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perjan, Peru dan Persero. Maka status perusahaan negara pos dan giro diganti menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro.

Dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, ditetapkan sarana pengawasan dan pembinaan Perjan, Perum dan Persero. Untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 yang mengatur tentang perusahaan umum pos dan giro telah diganti menjadi peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1984, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1995, perusahaan umum pos dan giro diganti menjadi PT.POS INDONESIA

PT. Negara merupakan salah satu bentuk perusahaan negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara. Pada umumnya persero ini terjadi dari perusahaan negara yang memerlukan penambahan modal, perusahaan negara ini kemudian ditawarkan kepada pihak swasta untuk dikelola lebih lanjut.

Tujuan persero adalah mencari keuntungan semaksimum dengan menggunakan factor-faktor produksi yang secara efektif dan efisien. Dasar hukum perubahan bentuk dari perusahaan negara menjadi PT.Persero adalah :

- Inpres RI Nomor Tahun 1967
- Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969
- Peraturan pemerinatah RI Nomor 7 Tahun 1967

Ciri-ciri Persero Menurut Inpres RI Nomor 7 Tahun 1967 adalah :

1. Makna usaha untuk mencari keuntungan
2. Status hukumnya adalah hukum perdata berbentuk PT
3. Hubungan-hubungan usaha diatur menurut hukum perdata

4. Modal seluruhnya atau sebagaian milik negara dan kekayaan negara dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Hal ini memungkinkan melaksanakan usaha dengan pihak swasta, baik nasional maupun Internasional sekaligus memungkinkan penjualan saham.
5. Tidak memilki fasilitas negara
6. Pimpinan dipegang oleh direksi
7. Karyawannya berstatus pegawai swasta (bukan pegawai negeri)
8. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham adalah hak suara pemerintah berdasarkan banyaknya saham yang dimilki atau menurut perjanjian sebelumnya.

Syarat-syarat perubahan bentuk perusahaan negara menjadi Persero menurut peraturan pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1969 adalah :

a. Telah melakukan penyehatan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara factor-faktor produksi menunjukan perbandingan yang rasional.
b. Telah menyusun neraca dan perkiraan rugi laba sampai saat dijadikan sebagai Persero dengan ketentuan bahwa neraca likuidasinya diperkirakan oleh Direktorat Akuntansi Negara dan disyahkan oleh yang bersangkutan.
c. Telah melunasi semua hutang-hutangnya kepada Kas umum Negara.
d. Ada harapan baik untuk mengembangkan usahanya tanpa rugi.

Tujuan Pembentukan Kantor Pos

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang pos antara lain menyatakan bahwa pos diselenggarakan guna menunjang pembangunan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar negara.

Kedudukan PT.Pos Indonesia (Persero)

Berdasarkan keputusan Memteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tentang organisasi dan tata kerja PT.Pos Indonesia, berkedudukan PT.Pos Indonesia adalah :

a. PT.Pos Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lingkungan pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
b. PT.Pos Indonesia dipimpin oleh seorang direksi yang bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.

Fungsi PT.Pos Indonesia (Persero)

Untuk memyelenggarakan tugas pokok diatas, PT.Pos Indonesia (Persero) mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan jasa giro dan giro pos
b. Pengelolaan kegiatan pemasaran dan pengembangan jasa pos dan giro serta jasa keagenan.
c. Pemgelolaan kepegawaian dan ketatausahaan
d. Pengelolaan keuangan
e. Pengelolaan perlengkapan dan pembangunan

f. Pengawasan fungsional

g. Penyusunan rencana kegiatan perusahaan

h. Pengelolaan penelitian dan peltihan.

Visi dan Misi Perusahaan

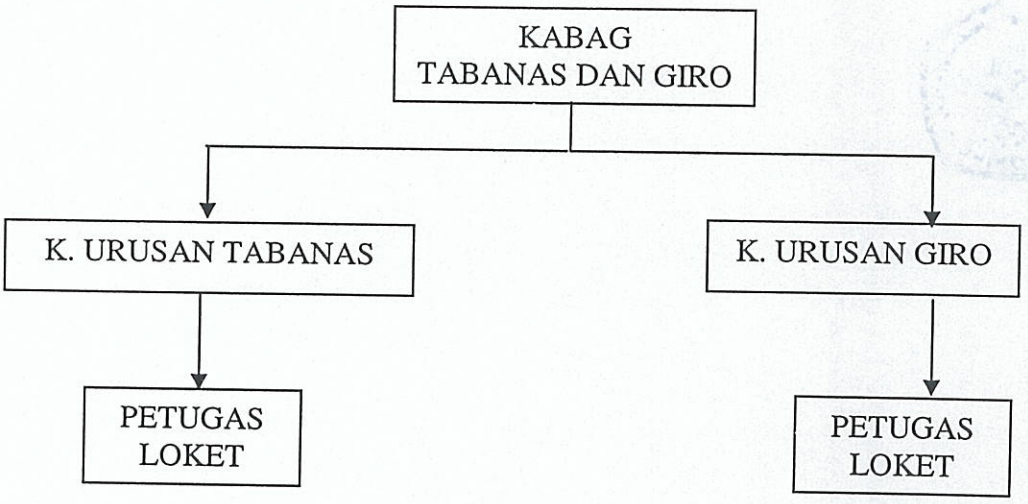
1. Visi Perusahaan

Pos Indonesia senantiasa berupaya untuk menyediakan sarana komunikasi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan, dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang professional, sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat.

2. .Misi Perusahaan

- Menyediakan sarana komunikasi yang handal dan tepercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.
- Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna untuk mencapai pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimum bagi karyawan, pemegang saham, masyarakat dan mitra kerja.

2.2 Struktur Organisasi Tabanas dan Giro



2.3 Deskripsi Jabatan

1. Kepala Bagian Tabanas Dan Giro
   a. Mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas baik pada bagian Tabanas maupun pada bagian Giro.
   b. Menyerahkan Form IV (Daftar Mutasi Harian), Form III (Buku Tabungan) ke loket pada awal dinas dan menerima sisa barang berharga tersebut pada akhir dinas.
   c. Mengawasi penyimpanan barang-barang barharga berupa Form IV, Gir-6, dan lain-lain.
   d. Mengawasi pemeriksaan terhadap naskah-naskah yang mendukung pembuatan neraca Tabanas maupun neraca Giro.

e. Mengadakan pengawasan terhadap SIP (Surat Izin Pembayaran) dari BTN untuk diserahkan kepada publik yang berhenti dan mengadakan daftar bunga dari BTN.

f. Mengadakan pemeriksaan terhadap laporan pekanan Tabanas, laporan Gir-7, Gir-10, laporan CPW-4 dan pengiriman jangan sampai terlambat.

g. Mengadakan pemeriksaan periodic baik pada bagian Tabanas maupun pada bagian Giro.

h. Mengadakan pembinaan terhadap pegawai yang berada dibawah pengawasan Kabag Tabanas dan Giro.

i. Memberikan pelayanan langsung pada publik dalam pemberian informasi yang diperlukan publik jika dapat ditangani oleh pegawai loket maupun oleh kepala urusan yang terkait.

j. Bertanggung jawab atas semua kelancaran pelaksanaan pelayanan di loket dan surat menyurat yang berhubungan dengan bagian Tabanas dan Giro.

k. Membantu atasan mengenai permasalahan yang berhubungan langsung dengan bagian Tabanas dan Giro.

l. Bertanggung jawab terhadap atasan langsung kepala kantor pos Bandung (KKPB) I Bandung 40000 melalui WKPB Bandung 4000

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

e. Mengadakan pengawasan terhadap SIP (Surat Izin Pembayaran) dari BTN untuk diserahkan kepada publik yang berhenti dan mengadakan daftar bunga dari BTN.

f. Mengadakan pemeriksaan terhadap laporan pekanan Tabanas, laporan Gir-7, Gir-10, laporan CPW-4 dan pengiriman jangan sampai terlambat.

g. Mengadakan pemeriksaan periodic baik pada bagian Tabanas maupun pada bagian Giro.

h. Mengadakan pembinaan terhadap pegawai yang berada dibawah pengawasan Kabag Tabanas dan Giro.

i. Memberikan pelayanan langsung pada publik dalam pemberian informasi yang diperlukan publik jika dapat ditangani oleh pegawai loket maupun oleh kepala urusan yang terkait.

j. Bertanggung jawab atas semua kelancaran pelaksanaan pelayanan di loket dan surat menyurat yang berhubungan dengan bagian Tabanas dan Giro.

k. Membantu atasan mengenai permasalahan yang berhubungan langsung dengan bagian Tabanas dan Giro.

l. Bertanggung jawab terhadap atasan langsung kepala kantor pos Bandung (KKPB) I Bandung 40000 melalui WKPB Bandung 4000

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Adapun aspek kegiatan PT. POS INDONESIA dalam memberikan jasa kepada masyarakat, adalah :

1. Surat Pos

   Merupakan layanan standar pengiriman berita yang tersedia di semua kantor pos dengan tarif seragam, baik untuk perhubungan didalam maupun diluar negeri.

   Klasifikasi pengiriman surat pos adalah :

   - Surat
   - Kartu pos
   - Barang cetakan
   - Majalah
   - Warkat pos
   - Bingkisan

2. Surat kilat

   Merupakan untuk kiriman pos cepat didalam negeri yang menjangkau seluruh Indonesia dengan prioritas kecepatan dalam penyaluran dan pengantarannya.

3. Surat Kilat Khusus (SKK)

   Merupakan layanan terdokumentasi sebagai solusi tepat kiriman pos didalam negeri sehingga dapat dilakukan jejak lacak guna mengetahui status kiriman.

4. Express Mail Service (EMS)

   Merupakan layanan cepat pengiriman berita atau barang sebagai nsolusi tepat kiriman pos Internasional dengan fasilitas jejak lacak guna mengetahui status kirinan.

5. Wesel Pos

   Merupakan layanan transfer uang sebagai solusi kiriman uang keseluruh Indonesia, tersedia beberapa jenis layanan wesel pos yaitu :

   - Wesel pos biasa
   - Wesel pos kilat
   - Wesel pos khusus
   - Wesel pos elektronok
   - Wesel pos berlangganan
   - Wesel pos luar negeri

6. Giro Pos

   Merupakan layanan keuangan untuk menampung, menyimpan dan membayar transaksi, baik untuk pemegang rekening perorangan maupun perusahaan atau keperluan bisnis diseluruh Indonesia.

7. Paket Pos

   Merupakan layanan pengiriman barang yang dapat dilakukan disemua kantor pos, baik untuk perhubungan dalam negeri maupun luar negeri.

   Klasifikasi paket pos dapat dibedakan dari sasarn pengangkutannya yaitu :

   - Paket pos darat atau untuk perhubungan udara
   - Paket pos udara untuk perhubungan udara

Khusus untuk jalur lintas Sumatera,Jawa dan Bali, transportasi dilakukan oleh armada sendiri yang disebut " Armada Paket Pos "

8. Filateli

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan memperdaya khasanah hobby mengumpulkan prangko atau filateli, telah dikembangkan pula produk – oroduk filateli yang lebih atraktif dengan tempo penerbitan yang bervariasi.

9. Layanan Keagenan

Pelaynan jasa keagenan dilakuka oleh PT. POS INDONESIA untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu :

- Penabungan dan pembayaran untuk BTN
- Pemotongan pensiun ex Bank kreditur
- Pembayaran pensiun TASPEN dan ASABRI
- Penjualan benda materai untuk diektor pajak